

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SEKITAR
TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH**

***PEOPLE PERCEPTION ON THE GOVERNMENT'S POLICY IN HANDLING THE
CATASTROPHE OF FOREST AND LAND FIRES IN BUKIT TIGA PULUH
NATIONAL PARKS AREA***

Robby Wirianto¹, M.Mardhiansyah², Evi Sri Budiani²
Forestry Department, Agriculture Faculty, University of Riau
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau
(Email: wiriantorobby2@gmail.com)

ABSTRACT

Bukit Tiga Puluh National Parks (TNBT) is a nature conservation area which the management are influence by people activities in the surrounding area. Public perception can be identified with an individual responses to something they have been seen, heard, and felt in their environment. Forest and land fires always happens every year. One of the government effort to reduce the forest and land fires is by releasing a policy to handling the catastrophe of forest and land fires. Survey method is a way of collecting data where the researcher or the data collector give a question or statement to the respondent either in verbally or in writing. There are 38 respondent taken 30 respondents from the three villages, and 8 respondents to the relevant institutions 2 respondents from National Park, 2 respondents from the forestry service and 4 respondents from non government organizations. The result showed that most of the villagers didn't know about the government policy on forest and land fires. This research shows that 50% of Rantau Langsat villagers, 100% of Sungai Akar villagers, and 70% of Talang Lakat villagers didn't know yet about the policy of the forest and land fires.

Keywords: National Park, Forest and Land Fires, Policy, Public Perception

PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) merupakan kawasan pelestarian alam yang didalam pengelolaannya dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Aktifitas masyarakat di sekitar kawasan mayoritas adalah membuka lahan untuk perkebunan. Kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari kegiatan tersebut, sehingga kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan TNBT.

Mashudi dkk. (2010) Menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang sudah sering terjadi diberbagai tempat di Indonesia,

terutama selama musim kering. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bisa bermacam-macam. Selama ini sebagaimana sudah diketahui banyak pihak, penyebab utamanya adalah akibat aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dengan menggunakan api (dibakar), baik secara tradisional (oleh masyarakat), konversi lahan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri /Perkebunan sawit (swasta).

Polusi asap yang mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, baik nasional Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai akibat yaitu diantaranya hancurnya vegetasi,

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

timbulnya maupun global, serta menyebabkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu diupayakan pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu kepedulian para pihak dalam pencegahan dan penanggulangan masih kurang, bahkan pelaku pembakaran sering kali mengancam dan menentang (Sastradiharja, 2010).

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) merupakan kawasan Taman Nasional yang sangat terpengaruh oleh kegiatan masyarakat disekitar kawasan, secara keseluruhannya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Data luasan kebakaran yang telah dihimpun Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) selama 5 tahun terakhir (2011-2016) menunjukkan bahwa di kawasan tersebut sering terjadi kebakaran hutan dan lahan disetiap tahunnya. Pada tahun 2011 luasan yang terbakar yaitu 0 Ha, tahun 2012 seluas 12 Ha, tahun 2013 seluas 31 Ha, tahun 2014 seluas 123 Ha, tahun 2015 seluas 136 Ha (Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 2015).

Kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani ataupun mengurangi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan mengeluarkan suatu kebijakan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, namun persepsi masyarakat terhadap kebijakan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan disekitar TNBT berbeda-beda dimana masyarakat sebagai subjek yang cukup dekat dengan kawasan untuk membantu mensukseskan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu faktor penentunya adalah pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan studi untuk yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan TNBT Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di TNBT Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dan tiga desa yang berdekatan dengan Taman Nasional yaitu Desa Rantau Langsat, Desa Sungai Akar dan Desa Talang Lakat. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai terhitung dari Bulan Juni 2016 sampai Bulan Juli 2016.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data temuan titik api di TNBT selama 5 tahun terakhir, data luas kawasan yang terbakar selama 5 tahun terakhir, kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di TNBT. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kamera.

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti ataupun pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden pada tabel 1, baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2011).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Dokumentasi
2. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*)
3. Kuesioner
4. Observasi

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah (orang)
1	Balai TN	2
2	Dinas Kehutanan	2
3	LSM	4
4	Masyarakat	30
	Jumlah	38

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *quoted sampling* adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

dalam jumlah atau kuota yang diinginkan (Sugiyono *dalam* Susilana dan Johan, 2012).

Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis persentase. Menurut Umar (1999) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Teknik analisis persentase adalah data yang diperoleh dari responden di lapangan disusun dalam tabel-tabel, selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan berdasarkan kecenderungan pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner (Andriani, 2012).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Besar persentase alternatif jawaban
- F = Frekuensi alternatif jawaban
- N = Jumlah sampel penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

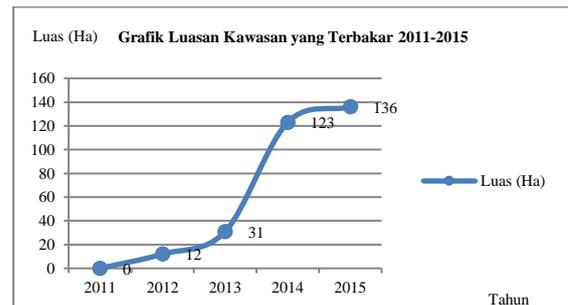
1. Luasan Kawasan Hutan Yang Terbakar Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Tahun 2011-2015

Data mengenai luasan kawasan hutan yang terbakar di TNBT pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 1. Kejadian kebakaran hutan di TNBT secara umum disebabkan oleh adanya pembukaan lahan yang akan dialihfungsikan sebagai perkebunan bagi masyarakat.

Data tahun 2011, tidak ada terjadi kebakaran disebabkan faktor perubahan cuaca, pada tahun 2012 luasan yang terbakar yaitu 12 Ha, pada tahun 2013 luasan yang terbakar yaitu 31 Ha, kemudian pada tahun 2014 luasan yang

terbakar 123 Ha, selanjutnya tahun 2015 luasan yang terbakar 136 Ha, menunjukkan kejadian kebakaran hutan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Rata-rata kebakaran terjadi pada musim kering utama/musim kemarau.

Gambar 1. Grafik Luasan Kawasan yang Terbakar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dari tahun 2011-2015



Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 2015

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Diterapkan Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan kawasan dan berdampak pada kerusakan ekologi yang lebih besar. Sebagai konsep rehabilitasi, konservasi, memperhatikan perkembangan kondisi TNBT, dan salah satu upaya pemerintah mencegah ataupun mengurangi berbagai ancaman khususnya kebakaran hutan dan lahan adalah penerapan kebijakan yang terkait masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa kebijakan pemerintah yang diterapkan di TNBT dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu diantaranya :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002 menetapkan 5 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program pembangunan nasional yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Lima kebijakan prioritas tersebut adalah :
 - a. Pemberantasan penebangan liar,

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

- b. Penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan,
 - c. Restrukturisasi sektor kehutanan,
 - d. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan,
 - e. Desentralisasi sektor kehutanan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50.
- a. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

3.1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Bahwa dari ketiga desa yaitu desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat 100% masyarakat mengetahui keberadaan TNBT. Hal ini disebabkan adanya informasi yang tersebar dan diterima oleh masyarakat sejak ditunjuk ataupun ditetapkannya TNBT.

Dari masyarakat desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat yang telah dilakukan wawancara untuk pengetahuan terhadap adanya keberadaan TNBT, mereka cukup mengetahui sedangkan untuk tujuannya dari TNBT masyarakat desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat hanya sebagian kecil yang mengetahui tujuan dari TNBT sehingga berdampak kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk keberlangsungan tujuan dari TNBT, hal utama yang

menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dalam tujuan TNBT yaitu kurangnya interaksi sosial yang dilakukan pihak Balai TNBT kepada masyarakat, yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsung		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1. Mengetahui keberadaan TNBT						
Mengetahui	10	100	10	100	10	100
Tidak mengetahui	0	0	0	0	0	0
2. Mengetahui tujuan TNBT						
Mengetahui	6	60	0	0	4	40
Tidak mengetahui	4	40	10	100	6	60

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Masyarakat desa Sungai Akar tidak mengetahui tujuan dari TNBT dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak taman nasional pada desa Sungai Akar sedangkan pada desa Talang Lakat dan Rantau Langsung jarang dilakukan sosialisasi terhadap TNBT dan terutama pada desa Talang Lakat dan desa Rantau Langsung juga terdapat Resort untuk masyarakat bertanya dan lebih mengenal tujuan TNBT.

3.2. Bentuk Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Terhadap Masyarakat

Berdasarkan kondisi spesifik TNBT (bio-fisik dan sosekbud) dan selaras dengan kebijakan nasional sektor kehutanan, khususnya dibidang perlindungan hutan dan pelestarian alam agar dapat menjadikan keseimbangan antara TNBT dengan masyarakat di sekitar taman nasional. Menurut Wahyuni (2010) keberadaan masyarakat di sekitar taman nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ekosistem taman nasional. Permasalahan yang kerap dialami oleh pengelola taman nasional

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

sebagian besar terkait dengan masyarakat sekitar hutan.

Tabel 3. Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsat		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1. Pengelolaan TNBT						
Mengetahui	6	60	1	10	4	40
Tidak mengetahui	4	40	9	90	60	60
2. Diskusi antara pihak TNBT dan masyarakat						
Berdiskusi	6	60	1	10	4	40
Tidak berdiskusi	4	40	9	90	6	60
3. Patisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNBT						
Berpartisipasi	5	50	1	10	4	40
Tidak berpartisipasi	5	50	9	90	6	60

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kurang mengetahuinya masyarakat dalam pengelolaan TNBT menyebabkan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap apa yang sedang di upayakan pihak TNBT dalam menjaga keberlangsungan kawasan hutan dari dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBT dari masyarakat desa Rantau Langsat, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat yang tingkat pengetahuan dalam pengelolaan masih sangat rendah. Sosialisasi dengan metode diskusi merupakan suatu kegiatan saling bertukar pikiran, pendapat, serta ide ataupun gagasan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, hal ini juga diterapkan dalam pengelolaan taman nasional agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik serta saling memberi suatu masukan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan taman nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNBT adalah merupakan keikutsertaan anggota masyarakat dalam

pengelolaan TNBT. Partisipasi suatu keterlibatan masyarakat dengan pengelolaan TNBT untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam antara masyarakat di sekitar taman nasional dengan memberikan respon baik dalam setiap kegiatan yang mengarah pada perlindungan sumber daya alam hayati serta ekosistem taman nasional. Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan TNBT dikarenakan rendahnya motivasi ataupun dorongan dalam diri masyarakat tersebut untuk dapat bertidak dalam partisipasi, motivasi ataupun yang mendorong diri masyarakat adalah adanya suatu hal yang akan didapat pada nantinya setelah ikut berpartisipasi.

3.3. Manfaat keberadaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Masyarakat yang merasakan manfaat adalah masyarakat yang berhubungan baik dengan pihak TNBT, misalnya masyarakat yang sering mendapat kunjungan sosialisasi kepada TNBT, sehingga dapat menjalin hubungan dalam menjaga kawasan hutan untuk keberlangsungan taman nasional. Beberapa masyarakat ada yang memiliki pendapat tentang manfaat yang dirasakan mengenai iklim disekitar tempat tinggal masyarakat tersebut terasa lebih sejuk dibandingkan pemukiman yang jauh dari kawasan TNBT.

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa keberadaan TNBT diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan terbentuk. Tingkat kesejahteraan masyarakat dari kehadiran taman nasional dapat terlihat dari ada tidaknya manfaat yang didapatkan. Pemanfaatan merupakan salah satu poin dari konsep pengelolaan taman nasional.

Kurangnya manfaat TNBT bagi masyarakat desa Rantau Langsat, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat yang membuat masyarakat menjadi kurang menjaga kawasan TNBT masyarakat

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

beranggapan untuk memaksimalkan manfaat TNBT yang di rasakan masyarakat membuat masyarakat membuka lahan baru untuk keperluan bertani ataupun berkebun dengan cara pembakaran.

Tabel 4. Manfaat Taman Nasional bagi masyarakat

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsung		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1. Manfaat TNBT bagi masyarakat						
Bermanfaat	6	60	1	10	4	40
Tidak bermanfaat	4	40	9	90	6	60
2. Dampak TNBT bagi masyarakat						
Berdampak positif	5	50	3	30	6	60
Tidak berdampak positif	5	50	7	70	4	40
3. Kontribusi dari TNBT untuk masyarakat						
Adanya kontribusi	2	20	0	0	0	0
Tidak ada kontribusi	8	80	10	100	10	100

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Kemudian ditinjau dari segi dampak positif yang di rasakan masyarakat desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat dari TNBT masih sangat kurang dirasakan dampak positif kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan semakin menyempitnya kawasan TNBT. Dari kontribusi TNBT kepada masyarakat desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat bisa dibilang tidak adanya kontribusi yang dirasakan masyarakat membuat masyarakat merasa tidak ikut menjaga kawasan TNBT sehingga berdampak negatif untuk keberlangsungan TNBT.

3.4. Perlindungan Kawasan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Mayoritas masyarakat desa Rantau lakat, desa Sungai akar dan desa Talang lakat menjawab mengenai tanggung jawab menjaga hutan adalah pemerintah dan masyarakat, hal ini bisa dikatakan adanya kesadaran masyarakat yang timbul akan pentingnya menjaga kawasan hutan, meskipun secara ekonomi lahan mereka untuk berkebun menjadi terbatas untuk berkebun dan bertani. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman baik itu perambahan kawasan hutan maupun kebakaran hutan. Menurut Sastradiharja (2010) kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman didalam pengelolaan kawasan TNBT yang dapat merusak kawasan dan mengurangi tutupan hutan. Definisi kebakaran hutan diambil secara umum yang masyarakat ketahui seperti kejadian terbakarnya kawasan hutan.

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga hutan ataupun TNBT tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dibutuhkan campur tangan masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat dan pemerintah harus saling berkolaborasi dalam mempertahankan kawasan hutan. Masyarakat itu sendiri memiliki peran lebih dekat dengan kawasan taman nasional.

Dalam hal melakukan tanggung jawab menjaga hutan yang utamanya di tujukan kepada masyarakat sekitar kawasan TNBT pada desa Rantau Langsung, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat, masyarakat beranggapan tidak adanya manfaat yang di rasakan masyarakat dari TNBT sehingga masyarakat tidak mau ikut serta dalam menjaga kawasan hutan. Kemudian dari segi pemahaman masyarakat tentang kebakaran hutan masyarakat tahu dan dampak dari

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

kebakaran hutan dan lahan masyarakat mengetahui tapi hal ini tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk terus membakar hutan.

Tabel 5. Perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsat		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1. Tanggung jawab menjaga hutan						
Masyarakat	1	10	0	0	0	0
Pemerintah	0	0	9	90	3	30
Masyarakat dan Pemerintah	9	90	1	10	7	70
2. Pengetahuan kebakaran hutan						
Mengetahui	10	100	10	100	10	100
Tidak mengetahui	0	0	0	0	0	0
3. Dampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan						
Mengetahui	10	100	8	80	9	90
Tidak mengetahui	0	0	2	20	1	10
4. Faktor penyebab terjadinya kebakaran						
Suhu	0	0	0	0	0	0
Pembukaan Lahan	10	100	9	90	10	100
Banyaknya bahan bakar	0	0	1	10	0	0
5. Pendapat masyarakat mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar						
Tepat	0	0	3	30	0	0
Ragu-ragu	2	20	7	70	1	10
Belum tepat	8	80	0	0	9	90
6. Masyarakat yang terkena sanksi apabila melakukan suatu pelanggaran mengenai kebakaran hutan dan lahan						
Ada	0	0	0	0	0	0
Tidak ada	10	100	10	100	10	100

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsat		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)

Lanjutan...

7. Solusi yang ingin masyarakat sampaikan tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada pihak TNBT

Ada solusi	1	10	0	0	1	10
Tidak ada Solusi	9	90	10	100	9	90

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Masyarakat beranggapan pembukaan lahan dengan cara di bakar mempermudah pekerjaan mereka dan murah biaya yang berdampak kebakaran hutan di setiap tahun selalu saja terjadi. Kemudian untuk solusi masyarakat tentang pembukaan lahan dengan cara lain hanya sedikit masyarakat yang mempunyai solusi, kebanyakan masyarakat lebih memilih dengan membakar karena murah dan muda dalam melakukannya sehingga berdampak secara turun temurun cara membakar terus saja di pakai sampai saat ini.

3.5. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Kawasan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah adalah pemegang kebijakan, kebijakan merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus disosialisasikan. Menurut Hamdi, (2014) melalui proses sosialisasi para anggota masyarakat belajar mengetahui dan memahami hal yang diharuskan, diperbolehkan, dianjurkan dan tidak boleh dilakukan.

Dapat di lihat pada tabel 6, adanya sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan masyarakat diharapkan

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

dapat menerapkannya serta dapat mengurangi ataupun mencegah ancaman dari pengelolaan TNBT khususnya masalah kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian kurangnya sosialisasi hal ini berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan/peraturan Undang-Undang mengenai kebakaran hutan dan lahan belum terlihat oleh masyarakat tersebut, yang membuat masyarakat masih saja terus membuka lahan dengan cara dibakar sehingga berdampak kurangnya luasan kawasan hutan pada saat ini.

Tabel 6. Sosialisasi kebijakan perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Alternatif Jawaban	Responden					
	Rantau Langsat		Sungai akar		Talang Lakat	
	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1. Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan						
Ada Sosialisasi	5	50	0	0	3	30
Tidak ada Sosialisasi	5	50	10	100	7	70
2. Pemasangan plang larangan membakar hutan dan lahan						
Mengetahui positif	4	40	7	70	7	70
Tidak mengetahui	6	60	3	30	3	30
3. Mengetahui adanya kebijakan/peraturan undang-undang mengenai kebakaran hutan dan lahan						
Mengetahui	3	30	1	10	3	30
Tidak mengetahui	7	70	9	90	7	70

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Desa Rantau Langsat, responden yang menyatakan mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan yaitu 50%, adanya sosialisasi yang dilakukan TNBT karena masyarakat cukup menanggapi sosialisasi tersebut. Pada desa Sungai Akar, responden yang menyatakan tentang adanya sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan bisa dibbilang tidak ada 0%, ini karena kurang

harmonisnya hubungan masyarakat desa Sungai Akar dengan pihak-pihak TNBT. Sementara itu pada desa Talang Lakat, responden menyatakan mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan 30% kemudian responden menyatakan tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan. Dari desa Rantau Langsat, desa Sungai Akar dan desa Talang Lakat yaitu desa Sungai Akar responden menganggap sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan dianggap hal yang kurang merata dalam pelaksanaannya. Kebijakan negara dalam bentuk Undang-Undang yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara umum belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Taman Nasioal Bukit Tiga Puluh adalah Desa Rantau Langsat, Desa Sungai Akar dan Desa Talang Lakat. Persepsi masyarakat tentang adanya kebijakan di TNBT sebagai berikut:

- Masyarakat Desa Rantau Langsat 50% belum mengetahui.
- Masyarakat Desa Sungai Akar 100% belum mengetahui.
- Masyarakat Desa Talang Lakat 70% belum mengetahui.

Saran

Agar kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasioal Bukit Tiga Puluh dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh baiknya perlu ditingkatkan adanya komunikasi sosial secara intensif dan adanya kegiatan sosialisasi secara rutin ataupun berkala.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani F. 2012. **Kendala asimilasi Etnis Tionghoa dan Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.** Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hamdi. 2014. **Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi.** Ghalia indonesia. Bogor.
- Sastradiharja. 2010. **Tanggap Bencana Kebakaran.** Penerbit Angkasa. Bandung.
- Sanusi. 2011. **Metode Penelitian Bisnis.** Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Susilana. R dan Johan. R. 2012. **Penelitian Pendidikan.** Jakarta
- Mashudi I., Gunawan dan Goalter. 2010. **Fenomena dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.** Jakarta.
- Umar. 1999. **Metode Penelitian : Aplikasi Dalam Pemasaran.** Gramedia. Jakarta.
- Wahyuni. 2010. **Persepsi Masyarakat Terhadap Taman Nasional dan Sumber Daya Hutan.** Balai penelitian kehutanan. Manado.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Jom Faperta UR Vol.4 No.1 Februari 2017